

Kompilasi Laporan Pos Kupang

Pemilu kepala daerah/wakil kepala daerah di NTT

Oleh Alfons Nedabang¹

**Pengantar: Tulisan ini merupakan kompilasi laporan berseri
Pos Kupang 11-13 Februari 2008 menyambut Pilkada di NTT 2008.**

Pendahuluan: Mencari pemimpin yang manusiawi

SUATU hari, saat itu siang bolong, dengan menenteng sebuah lentera yang menyala, Diogenes menyusuri lorong dan jalan-jalan di Kota Athena. Sebagian orang yang mengenal keeksentrikan filsuf yang hidup sekitar 2400 tahun lalu itu -- tidak punya rumah, hidup di dalam sebuah tong dan hanya memiliki sebuah mantel, sebatang tongkat dan satu kantung roti -- tidak menghiraukan tindakannya itu. Beberapa orang dipenuhi rasa ingin tahu dan bertanya kepadanya. "Diogenes, apa yang sedang Engkau lakukan?" Mendengar itu, Diogenes berhenti sejenak lalu menjawab, "Aku sedang mencari seorang manusia." Setelah berkata demikian, ia pun bergegas meninggalkan mereka lalu menghilang di ujung jalan.

Si Tua Diogenes capai keliling Athena, namun tidak seorang manusia pun yang ia temukan. Padahal selama perjalanan, ia berjumpa banyak manusia. Manusia seperti apakah yang Diogenes cari? Yang dicarinya adalah orang yang hidup patut dan wajar, sepatut dan sewajar seorang manusia. Yang bermartabat. Seorang manusia yang manusiawi. Yang punya hati. Yang matanya punya perhatian, yang berbudi luhur dan berakhlak. Manusia yang peduli dengan sesamanya.

Menapaki jejak Diogenes, kita juga mencari. Mencari figur pemimpin kepala daerah/wakil kepala daerah. Proses pencarian itu kita lakukan sudah bertahun-tahun lamanya, setiap lima tahun sekali dengan pemilihan/pemilu kepala daerah sebagai bingkainya. Proses pencarian memang tidak seratus persen dilakukan oleh rakyat NTT

¹ Dari Pos Kupang 11-13 Februari 2008. http://www.indonesia.com/poskup/2008/02/11/edisi11/utama_4.htm
http://www.indonesia.com/poskup/2008/02/12/edisi12/utama_4.htm;
http://www.indonesia.com/poskup/2008/02/13/edisi13/utama_4.htm

karena sistem mengatur penjurangan dan pencalonan kepala daerah dilakukan partai politik (parpol). Kalaupun calon yang diusung parpol tidak sesuai dengan harapan, toh rakyat tetap diwajibkan untuk memilih. Kalau tidak memilih, maka stigma golput, pembangkang, tidak demokratis, diberikan.

Pada tahun 2007, misalnya, 200 ribu warga Kota Kupang mencari figur walikota dan wakil walikota Kupang. Berbeda dengan Diogenes yang tidak menemukan sosok manusia yang ia cari, syukur warga kota bisa berhasil ketemu Drs. Daniel Adoe dan Drs. Daniel Hurek.

Di tahun 2008 ini, kita mencari 12 pasang figur pemimpin. Diawali dengan mencari figur bupati dan wakil bupati Sikka. Kemudian, mencari figur gubernur dan wakil gubernur NTT, menggantikan Piet A Tallo, S. H dan Drs. Frans Lebu Raya yang sudah berakhir masa jabatan, selanjutnya mencari figur bupati/wakil bupati Nagekeo, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Rote Ndao, Timor Tengah Selatan (TTS), Belu, Alor, Kupang, Ende dan bupati/wakil bupati Manggarai Timur.

Dengan demikian, maka kita pasti mengarahkan pandangan dan memasang kuping untuk merekam informasi seputar pemilu kepala daerah pada 12 daerah itu. Tentang siapa yang menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Keluar lewat pintu mana. Agenda pertemuan digelar di mana dan siapa-siapa yang terlibat. Bahkan lebih dari itu, misalnya dengan terlibat aktif mempromosi paket, menyebarkan leaflet, pasang spanduk dan poster. Sampai kasak-kusuk siapa yang paling kuat sehingga bakal terpilih.

Tanpa bermaksud mengesampingkan, dibandingkan dengan pencarian figur pemimpin kabupaten, pencarian figur gubernur dan wakil gubernur NTT dapat dipastikan mengundang perhatian yang lebih dari 4,4 juta penduduk NTT yang terserak sebar di 283 kecamatan, 303 kelurahan dan 2.537 desa. Karena hajatan itu memilih orang nomor satu dan nomor dua di NTT, maka diyakini suasananya lebih riuh terdengar. Lebih gegap gempita.

Tanda-tanda gempitanya pemilu gubernur dan wakil gubernur NTT sudah terlihat jauh hari sebelumnya, padahal titik starnya baru dimulai 15 Februari, empat hari lagi, yang ditandai dengan pemberitahuan DPRD kepada gubernur dan wakil gubernur mengenai berakhirnya masa jabatan.

Beberapa partai dan koalisi partai sudah mendeklarasikan paket calonnya. Acara deklarasi dirancang menjadi sebuah pesta yang meriah, sampai-sampai rakyat yang terlibat pun mabuk kepayang. Memberi pesan bahwa seolah mereka (paket yang diusung) sudah menang. Sementara yang belum deklarasi, elite parpol dan bakal calonnya beserta tim sukses sibuk membangun komunikasi. Yang sudah deklarasi tapi belum aman, juga masih sibuk memantapkan diri.

Di tengah kesibukan pemilu kepala daerah itu, semestinya luapan kegelisahan Diogenes yang mendalam terhadap perilaku manusia pada zamannya patut untuk direnungkan. Jika ia hidup pada zaman sekarang, pastilah ia juga punya kegelisahan yang sama terhadap perilaku pemimpin/kepala daerah kita. Pasalnya, banyak pemimpin di daerah ini yang tidak sepenuhnya memperhatikan nasib rakyatnya. Sewaktu belum terpilih, janji muluk-muluk untuk rakyat. Sehari tidak bertemu rakyat, terasa hambar bak sayur tanpa garam. Tapi setelah terpilih, yang jamak ialah melupakan bahkan menggadai rakyatnya untuk popularitas dan kebahagiaan. Yang penting sukses dan bahagia, peduli amat dengan rakyat.

Semoga pemilu gubernur dan wakil gubernur yang biayanya menelan dana Rp 102 miliar itu bisa menemukan seorang pemimpin yang manusiawi. Yang memperhatikan dan mau bekerja menyejahterahkan rakyatnya. Bukan pemimpin yang hanya urus teman, bukan yang pandai membuat memo, dan juga bukan pemimpin yang memosisikan diri sebagai orang penting.

Rapuhnya mesin politik parpol

MUSIM pilkada, musim ribut-ribut. Diawali dengan konflik antarpengurus partai politik (parpol). Dengan maksud menentukan dan mendukung satu pasang calon yang diusung partainya, masing-masing kubu akan berebut tiket untuk menaiki kendaraan politik tersebut.

Ribut-ribut di parpol dapat kita simak lewat contoh berikut. Yang lagi hangat sekarang adalah konflik antarpengurus Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) dari pusat hingga daerah. PPDI NTT terbelah dua, kelompok Simon Hayon - Marthen Tokan yang

didukung Soerjadi dan kubu John Dekresano - Mes Pah yang pro Mentik Budiono dan Joseph Lea Wea.

Pemicunya adalah perbedaan figur calon gubernur dan wakil gubernur NTT yang hendak diusung. Simon Hayon cs lebih memilih Beny K Harman sebagai calon gubernur, sementara John Dekresano cs memilih Gaspar Ehok.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga konflik. Arif Rahman cs berseteru dengan ketua DPW PPP NTT, Yahidin Umar. Persoalannya, Arif Rahman menolak paket calon bupati dan wakil bupati Sikka, Drs. Landoaldus Mekeng - Drs. Fransiskus Sura, yang didukung DPW PPP. Menurut Arif Rahman, Mekeng tersangkut kasus korupsi sehingga lebih tepat jika PPP mendukung Drs. Yoseph Ansar Rera yang kini menjabat Wakil Bupati Sikka.

Partai lainnya yang pengurusnya juga berkonflik adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sejak awal PKB Sikka telah memberi dukungan untuk Mekeng - Sura, namun kabar terbaru dapat dipastikan kabar itu membuat sejumlah pengurus dan calon bupati dan wakil bupati PKB terganggu adalah turunnya restu Ketua Dewan Syuro PKB, Gus Dur untuk Ansar Rera- Urbanus Lora.

Kasus terakhir ini membuat kita teringat akan hajatan pilkada Kota Kupang, dimana terjadi perseteruan antara Ketua PKB Kota Kupang, Drs. Daniel Hurek dengan Yucun Lema (ketua DPW PKB NTT sebelumnya). Artinya, konflik PKB telah bergeser dari Kota Kupang ke Sikka.

Golkar yang dibilang partai paling solid juga akhirnya pecah di Sikka. Golkar Sikka memiliki pengurus ganda. YB Semadu Sadipun dan Suitbertus Amandus mengklaim diri paling sah sehingga mau mendaftarkan diri sebagai calon bupati dan wakil bupati. Sadipun - Amandus menentang DPD Partai Golkar Sikka yang dinakhodai Mekeng Bapa mencalonkan Alex Hendrik Bapa dan Robby Idong.

Apa yang terjadi di PPDI, PPP, PKB dan Golkar Sikka adalah fenomena gunung es. Diyakini, konflik di parpol lain akan mencul ke permukaan seiring dengan perjalanan waktu, memasuki tahapan pendaftaran dan penetapan calon oleh komisi pemilihan umum

daerah (KPUD). Adapun parpol yang sekarang terlihat aman dalam proses penetapan calonnya adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Sebagaimana diketahui bahwa setiap orang yang mencalonkan diri, melakukan pencalonan resmi lewat parpol atau gabungan parpol. Di sini terlihat, betapa peran parpol dalam proses pencalonan menjadi sangat penting. Tidak heran kalau parpol yang pada pemilu perolehan suaranya seret sehingga tidak mempunyai wakil di lembaga legislatif, pengurusnya busung dada karena bisa ikut mengajukan calon kepala daerah.

Parpol berperan sebagai pintu dan atau kendaraan pilkada. Parpol juga sebagai mesin yang bekerja untuk mengumpulkan dukungan rakyat. Dukungan dari jaringan partai yang sampai ke kelurahan dan pelosok desa memungkinkan calon menjaring banyak pemilih. Dengan demikian, semakin mudah bagi pasangan calon dalam meraih kursi kepala daerah.

Terlepas dari dukung mendukung, konflik yang meletup di parpol memunculkan anggapan rapuhnya kekuatan parpol. Konflik menjadikan parpol tidak efektif sebagai mesin politik dan membenarkan anggapan bahwa peran parpol dalam pilkada tidak lebih hanya sebatas pintu masuk bagi proses pencalonan. Itu pun tidak begitu saja luput dari persoalan-persoalan yang mengarah kepada gesekan antar kepentingan internal parpol itu sendiri. Kuatnya pengaruh kepengurusan pusat parpol dalam setiap kebijakan menyangkut pencalonan kepala daerah bahkan seringkali berseberangan dengan keinginan masyarakat partai di tingkat bawah menjadi kejadian lazim.

Konflik internal parpol dalam proses awal penjaringan bakal calon yang terkadang sampai berlarut-larut, sebagaimana dikemukakan pada awal tulisan, tentu saja membuka celah perpecahan dalam penentuan sikap. Dampak ikutannya adalah terganggunya keamanan. Maka, jangan salahkan polisi jika meminta dana keamanan pilkada senilai Rp 20 miliar. Sebab benih-benih konflik pilkada justru sudah disemaikan sejak penjaringan dan pencalonan oleh pengurus parpol.

Berdasarkan keadaan inilah, maka disinyalir parpol sesungguhnya tidak pernah dapat total menjalankan mesin politiknya mengingat ada sel-sel dalam tubuh internal parpol justru tidak bersedia bekerja sesuai keputusan organisasi, karena mereka merasa kepentingan politik diabaikan.

Oleh karena itu, bagi Anda yang sudah mendapatkan pintu/kendaraan, janganlah mengharapkan terlalu banyak terhadap mesin politik parpol. Hendaknya disadari bahwa masyarakat terdiri dari individu-individu otonom. Masyarakat bukanlah obyek pasif yang bisa dibujuk rayu oleh mesin politik. Era sekarang, rakyat lebih berperan secara sadar dan mampu memilih sendiri pemimpinnya.

Komitmen penyelenggara diuji

WAKTU pelaksanaan pilkada 167 hari. Alokasi waktu itu telah diatur dengan undang-undang. Karena NTT punya 12 pilkada - 11 pilkada di kabupaten dan pilkada propinsi - maka keseluruhan jumlah yang diperlukan untuk urusan pilkada sebanyak 2.004 hari. Meski setara dengan 5 tahun (1 tahun 365 hari), atas nama aturan, kita harus menyelesaikan 12 pilkada dalam tahun 2008. Melelahkan!

Oleh komisi pemilihan umum (KPU) kabupaten/propinsi, waktu 167 hari itu dijabarkan. Tersusunlah jadwal dan tahapan pilkada. Untuk pilkada gubernur/wakil gubernur NTT, jadwal dan tahapan pelaksanaan bertolak dari tanggal 15 Februari, waktu di mana DPRD NTT memberi tahu kepala daerah mengenai berakhirnya masa jabatan. Selanjutnya, dijadwalkan pemungutan suara terjadi 2 Juni dan pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih pada 16 Juli.

Bahwa waktu dan kegiatan sudah terjadwal, tidak menjamin pelaksanaan pilkada berlangsung aman dan lancar. Diyakini akan terjadi hingar-bingar. Karena ada begitu banyak potensi kerawanan yang terjadi selama kurun waktu 167 hari. Merujuk pada pengalaman di daerah lain, titik rawan mulai dari periode waktu pendaftaran pemilih. Hal ini perlu diwaspadai karena sangat memungkinkan adanya rekayasa pemilih demi kepentingan calon tertentu dalam pilkada. Proses penjaringan calon juga mengandung titik rawan, termasuk berpotensi sebagai celah praktek money politics. Periode waktu untuk tahap penelitian calon juga merupakan titik rawan, karena ada begitu banyak syarat administrasi yang harus dipenuhi setiap calon.

Tahap kampanye juga sangat krusial karena memiliki kerawanan konflik yang sangat tinggi. Selama masa kampanye lazimnya suhu politik memanas. Pada tahap ini potensi konflik sangat rentan terjadi. Kampanye yang merupakan sarana bagi pasangan calon menjual visi-misi serta program-programnya kepada publik sangat rawan pelanggaran rambu peraturan yang telah ditetapkan ataupun disepakati. Black campaign (kampanye hitam) dapat terjadi sewaktu-waktu, hujat-menghujat, fitnah, pembunuhan karakter sering mewarnai arena kampanye. Apalagi jika kampanye dilakukan dengan memobilisasi massa yang besar seperti rapat umum serta pawai/arak-arakan massa berjalan kaki ataupun menggunakan sepeda motor dan mobil, ada kecenderungan akan bertindak brutal dan anarkis.

Jadwal dan tahapan pemungutan dan penghitungan suara juga sangat rawan dengan penyimpangan. Di sini integritas dari penyelenggara pemilu, yang berlaku adil dan jujur dalam menghitung suara, sangat menentukan. Pada tahap pemungutan suara, yang perlu diwaspadai adalah golongan putih (golput). Artinya masyarakat yang sudah terdaftar sebagai pemilih, tapi tidak menggunakan hak pilihnya untuk datang ke TPS. Banyaknya golput diindikasikan karena aspirasinya tidak dapat diakomodir partai politik ataupun kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.

Demikian pula pada tahap penghitungan suara. Biasanya penghitungan suara ditunggu-tunggu oleh masyarakat yang ingin secepatnya mengetahui hasil dari pemungutan suara. Pada tahap ini bisa saja terjadi deal antara petugas KPPS dan PPS dengan tim sukses pasangan calon yang bertarung. Melalui permainan politik uang, KPPS ataupun PPS menggunakan momen itu untuk memanipulasi hasil pencoblosan surat suara yang menguntungkan calon yang sebelumnya sudah berkoalisi dengannya.

Selain itu, pasca-pemungutan suara juga masih mungkin terjadi kerawanan, bila keputusan berkekuatan hukum tetap dikeluarkan setelah dilakukan penetapan calon terpilih. Penetapan calon terpilih sebagai pemenang pilkada adalah titik rawan yang paling tinggi. Kasus yang terjadi pada beberapa daerah hendaknya menjadi contoh. Mencermati beberapa titik rawan yang dapat saja terjadi, maka penyelenggara harus melakukan upaya-upaya antisipasif. KPUD sebagai institusi independen sampai tataran terbawah yang mempunyai otoritas harus tetap komit dan tegas serta benar-benar

melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pula dengan panitia pengawas (Panwas) dan aparat keamanan. Keduanya dituntut berperan lebih dalam mengawasi jalannya proses pilkada. Setiap pelanggaran yang terjadi, hendaknya sesegera mungkin diselesaikan dan atau diproses lebih lanjut. Pasangan calon yang akan bertarung juga dituntut mempunyai komitmen teguh menerima kekalahan.

Tidak kalah pentingnya juga adalah semestinya semua komponen masyarakat terlibat dengan menciptakan situasi yang kondusif demi suksesnya pelaksanaan pilkada. Hendaknya kita menyadari bahwa bukan hanya KPUD yang melaksanakan tahapan-tahapan pilkada dengan baik dan bertanggung jawab, tetapi seluruh masyarakat yang ada di NTT. Jika upaya itu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, mudah-mudahan pelaksanaan 12 pilkada di NTT dapat berjalan aman, tertib dan damai. Semoga.